



POLITIK DAN DAKWAH DALAM SIRAH NABAWIYAH: STUDI MULTIKASUS

Aris Kristianto

STID Al-Hadid, Surabaya
ariskristianto@stidalhadid.ac.id

Muhammad Hildan Azizi

STID Al-Hadid, Surabaya
hildan@stidalhadid.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas hubungan antara politik dan dakwah dengan menganalisis perilaku Nabi Muhammad saw dalam Sirah Nabawiyah. Memahami perbedaan dan hubungan keduanya penting untuk menghindari kerancuan dalam menafsirkan perilaku Nabi Muhammad saw dan memahami batasan peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Kerancuan penafsiran terhadap hal ini berpotensi memunculkan perilaku penyalahgunaan dakwah untuk kepentingan politik atau mengaburkan tujuan utama dakwah. Pendekatan kualitatif deskriptif berjenis multi-kasus berdasarkan kajian pustaka digunakan dalam pembahasan tentang hal ini. Hasil kajian menemukan bahwa politik dan dakwah adalah dua konsep yang berbeda, namun memiliki ruang hubungan yang saling beririsan. Perbedaan mendasar antara politik dan dakwah terletak pada objek perilakunya. Politik adalah pengelolaan kekuasaan, sedangkan dakwah adalah mengelola keimanan/ketakwaan suatu pihak. Dalam beberapa kasus, Nabi Muhammad saw melakukan kegiatan politik murni atau dakwah murni, namun juga terdapat kegiatan yang mengandung unsur politik dan dakwah secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa politik dan dakwah dapat saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Kata kunci: dakwah, politik, dakwah kultural, dakwah struktural, dikotomi

Abstract: **POLITICS AND DA'WAH IN THE NABAWIYAH SIRAH: A MULTI-CASE STUDY.** This article discusses the relationship between politics and da'wah by analyzing the Prophet Muhammad's behavior in Sirah Nabawiyah. Understanding the difference and relationship between the two is important to avoid confusion in interpreting the Prophet Muhammad's behavior and in understanding the limits and role of religion in social and political life. The confusion of interpretation of this matter has the potential to lead to misuse of da'wah behavior for political interests or obscure the main purpose of da'wah. A multi-case descriptive qualitative approach based on literature review is used in the discussion of this matter. The results of the study found that politics and da'wah are two different concepts, but have intersecting relationship. The fundamental difference between politics and da'wah lies in the object of behavior. Politics is the management of power in society, while da'wah is managing human faith/piety. In some cases, the Prophet Muhammad PBUH carried out pure political activities or pure da'wah, but there were also activities that contained elements of politics and da'wah simultaneously. This shows that politics and da'wah can be interrelated and strengthen each other.

Keywords: da'wa, politics, cultural da'wa, structural da'wa, dichotomy

Pendahuluan

Kajian tentang hubungan antara politik dan dakwah yang dilakukan oleh akademisi bidang studi Islam justru semakin membingungkan batasan realitas yang mewakili masing-masing konsep politik dan dakwah itu sendiri. Terdapat kajian yang ekstrem membedakan kedua konsep tersebut tanpa memberi ruang irisan di antara keduanya.¹ Ada pula yang ekstrem menyamakan keduanya.² Selain itu terdapat kajian yang masih belum berani secara tegas membedakan keduanya.³ Meski memang ada juga kajian yang membedakan keduanya dengan tetap mencoba menghubungkannya dengan tetap mencoba menghubungkannya dengan asumsi bahwa politik selalu berkedudukan sebagai subordinat atas dakwah.⁴

Perkembangan kajian multidisipliner ilmu tentang hal ini semakin rumit dengan hadirnya beberapa kajian yang memaksakan hubungan antara konsep politik dan dakwah ke dalam konsep dakwah politik, politik dakwah, atau dakwah struktural; tanpa terlebih dahulu menjelaskan bahwa kedua konsep itu merupakan hal yang berbeda.⁵ Belum lagi ambiguitas konseptual itu semakin dipersulit jika dihadapkan pada perkembangan ilmu politik yang hingga kini

masih belum secara tegas mendefinisikan mengenai politik itu sendiri. Paradigma klasik yang dimotori Aristoteles menekankan pada asosiasi warga negara, sedangkan paradigma kelembagaan yang diusung Max Webber lebih condong pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan, di sisi lain paradigma kekuasaan sebagaimana penjelasan William Robson menekankan pada perolehan dan pemertahanan kekuasaan, juga terdapat paradigma kebijakan sebagaimana usulan David Easton yang mendefinisikan politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, serta ada pula paradigma konflik ala Karl Marx yang juga fokus pada kebijakan umum namun ditambahkan faktor tujuan yakni guna mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai.⁶

Sedangkan di sisi lain, dalam ilmu dakwah sendiri telah dikenal dengan konsep dakwah bil hal yakni menyeru kepada manusia dengan cara langsung praktik mencontohkan perilakunya.⁷ Asumsi itu jika diperluas bukan tidak mungkin juga mencakup pada perilaku-perilaku politik pula. Lantas menjadi suatu pertanyaan retorik: Apakah ketika terdapat pelaku politik yang memberikan contoh cara

¹ Nelly Indrayani and Budi Purnomo, "Transformasi Politik Ke Jalur Dakwah: Studi Analitis Politik Masyumi Tahun 1960-1967," *Diakronika* 23, no. 1 (June 26, 2023): 44–67, <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol23-iss1/311>.

² Syamsul Bachri Day, "Hubungan Politik Dan Dakwah," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 1 (June 10, 2005): 7–16, <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i1.1171>; Cecep Suryana, "Politik Sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (June 11, 2021): 41–58, <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12646>.

³ Badrah Uyuni, "Relationship Between Politics and Dakwah in The Qur'an and As-Sunnah," *Al-Risalah* 12, no. 2 (June 11, 2021): 187–207, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1382>.

⁴ Hamzah Khaeriyah, "Dakwah Dalam Bingkai Politik," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (April 2, 2018): 31–64, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i1.64>.

⁵ Mursyidul Wildan, Saepudin, and Agus Zamzam, "Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah," *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 8, no. Piagam Madinah (2022): 136, <https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2653>; Zainal Fikri, "Politik Islam Antara Dakwah Dan Orientasi Kekuasaan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 26 (2017): 55–60.

⁶ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik" (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 2.

⁷ Reka Gunawan and Abdul Muhid, "The Strategy of Da'wah Bil Hal Communication: Literature Review," *KOMUNIKE* 14, no. 1 (June 30, 2022): 33–50, <https://doi.org/10.20414/jurkom.v14i1.5270>.

berpolitik yang baik atau beretika, sama dengan ia sedang berdakwah bil hal sebagai seorang dai?

Pada akhirnya, ambiguitas konseptual ini memicu kerancuan pada tataran realitas. Potensi kekeliruan identifikasi terhadap berbagai fenomena dakwah maupun politik sangat besar probabilitasnya. Bisa saja realitas dakwah salah ditafsirkan sebagai politik, begitu juga sebaliknya. Sehingga tanggapan terhadapnya memungkinkan mengalami kekeliruan pula.

Kesalahan dalam menafsirkan dimensi politik dan dakwah dalam perilaku Nabi Muhammad saw berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dakwah untuk kepentingan politik. Hal ini dapat terjadi ketika aspek-aspek politik dalam dakwah Nabi dipisahkan dari konteksnya dan diinterpretasikan secara sempit untuk mendukung agenda politik tertentu. Berdalih merujuk pada perilaku nabi, nyatanya yang dilakukan hanya fokus pada orientasi kekuasaan, meskipun harus mengorbankan orientasi awal dakwah itu sendiri.

Muncul fenomena praktik penggunaan stigma agama untuk menyerang lawan politik, pemanfaatan kegiatan kajian dakwah untuk pencitraan kampanye elektoral, termasuk politisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang dilepaskan dari konteks dan orientasi turunnya wahyu tersebut.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mempertegas definisi masing-masing

konsep politik dan dakwah sehingga dapat dibedakan realitas antara keduanya, namun tetap dapat menjelaskan hubungan di antara keduanya dalam realitas-realitas yang kompleks/kombinatif.

Metode

Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis *multiple case study* terhadap peristiwa-peristiwa politik dan dakwah dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad saw yang dipilih secara *purposive* sebagai konsekuensi atas esensi masalah multidimensional dalam kajian ini sehingga diharapkan bisa mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara realitas dakwah, politik, atau kombinasi keduanya.⁸ Kajian ini juga bersifat pustaka yakni mendapatkan data dari sumber-sumber sekunder rujukan sejarah *Sirah Nabawiyah* baik dalam bentuk buku, jurnal, tesis, atau disertasi yang memiliki relevansi terhadap kasus-kasus terpilih.

Desain penelitian *multi-case study* dimulai dari pemilihan kasus dan protokol pengumpulan data berdasarkan pengembangan konsep/teori hasil dari *literature review*.⁹ Dalam hal ini terpilih lima kasus di antaranya: Nabi berdakwah kepada Bani Hasyim dan Abdul Muthalib, Politik Nabi pada penyusunan Piagam Madinah, Politik Nabi pada penyusunan Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Berdakwah politik mengirimkan surat kepada para raja, Politik dakwah dibalik penaklukan Makkah. Kasus-kasus tersebut diteliti pada variabel

⁸ Johanna Gustafsson, "Single Case Studies vs. Multiple Case Studies: A Comparative Study," *Academy of Business, Engineering and Science Halmstad University* (Halmstad: Academy of Business, Engineering and Science Halmstad University, 2017), <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1064378%0Ah>

<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064378/FULLTEXT01.pdf>

⁹ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2017).

intensi/tujuan nabi dalam berperilaku pada tiap peristiwa, serta dampak perilaku nabi. Selanjutnya dilakukan pelaporan pada setiap kasus,¹⁰ jika terdapat muatan politik minimal salah satu di antara intensi atau dampak perilaku, maka dapat disimpulkan sifat politik di balik perilaku nabi dalam satu peristiwa. Selanjutnya dianalisis lintas kasus untuk ditarik kesimpulan batasan-irisan/persamaan-perbedaan antara konsep dan realitas politik serta dakwah.¹¹

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Politik

Terdapat lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹²

Pandangan-pandangan itu pada akhirnya tidak dapat memberikan kepastian bagi para

akademisi maupun praktisi mengenai batasan dan ruang lingkup fenomena politik. Padahal setiap pandangan itu memiliki keterbatasannya masing-masing kecuali pada pandangan ketiga.

Pandangan pertama dan kedua membatasi konsep politik berada pada ruang lingkup negara. Padahal terdapat pula realitas politik yang terjadi di dalam organisasi, yakni upaya merebut/mempertahankan dan mengembangkan pengaruh di dalam organisasi, baik organisasi bisnis maupun hingga nonprofit.¹³ Pandangan keempat memang tidak spesifik memberi batasan ruang lingkup politik yang bisa terjadi di tingkat negara hingga tingkat organisasi, namun pandangan ini membatasi ruang lingkup politik hanya pada fenomena kebijakan umum. Padahal ada pula fenomena politik yang tidak terkait dengan kebijakan umum sama sekali, misalnya seperti fitnah terhadap Aisyah pasca ekspedisi Musthaliq yang oleh kaum munafik targetkan kepada kekuasaan nabi.¹⁴ Sedangkan pandangan kelima terlalu berparadigma konflik, seakan tidak ada perilaku politik yang sifatnya kerja sama. Padahal nyatanya masih terdapat praktik-praktik politik kerja sama sebagaimana peristiwa Piagam Madinah maupun Perjanjian Hudaibiyah.¹⁵

¹⁰ Yin.

¹¹ Yin.

¹² Surbakti, "Memahami Ilmu Politik," 2.

¹³ Wayne A Hochwarter et al., "Perceptions of Organizational Politics Research: Past, Present, and Future," *Journal of Management* 46, no. 6 (July 20, 2020): 879–907, <https://doi.org/10.1177/0149206319898506>; Gerald R Ferris et al., "Reorganizing Organizational Politics Research: A Review of the Literature and Identification of Future Research Directions," *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 6, no. 1 (January 21, 2019): 299–323,

<https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015221>.

¹⁴ Mohd Kamel Mat Salleh, "Isu Fitnah Dan Khabar Di Sebalik Peristiwa Perang Bani Al-Mustaliq" (Negeri Sembilan: Universiti Teknologi MARA, 2024), <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/94096>.

¹⁵ Siti Fatimah, "Dakwah Struktural: Studi Kasus Perjanjian Hudaibiyah," *Jurnal Dakwah* 10, no. 01 (2009): 67–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jd.2009.101>; Wildan, Saepudin, and Zamzam, "Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah."

Oleh karena itu, lebih relevan apabila politik cenderung dipahami dari sudut pandang kekuasaan karena kekuasaan itu merupakan esensi dari politik.¹⁶ Sehingga akan lebih tepat jika politik didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengelolaan kekuasaan dalam organisasi/masyarakat, yakni bagaimana kekuasaan politik itu didistribusikan, dipisahkan, direbut, dipertahankan dan lain sebagainya.

Kekuasaan sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi pihak lain agar memenuhi kehendak subjek meski bertentangan dengan kehendaknya.¹⁷ Permasalahannya, kemampuan di sini lebih diartikan dari istilah *ability* daripada *skill*. Artinya kekuasaan politik bukanlah sesuatu yang didapat dari proses latihan seorang diri, melainkan suatu kemampuan yang didapatkan dari proses pengakuan pihak lain.¹⁸

Asumsi kekuasaan tersebut berkonsekuensi pada konsep politik pada aspek behavioral. Bahwa pengelolaan kekuasaan politik dapat terjadi jika terdapat komunikasi antara subjek dengan sasaran agar terbentuk pengakuan. Komunikasi seperti ini diteoretiskan ke dalam konsep komunikasi politik. Suatu komunikasi yang memiliki sifat politik jika dilihat dari dampak dan/atau intensi subjeknya.¹⁹ Jika komunikasi tersebut

dapat memengaruhi kondisi kekuasaan politik yang ada, juga terdapat intensi baik kehendak/kesadaran dari subjek bahwa komunikasinya dapat berdampak politik, maka dapat dipastikan bahwa komunikasi tersebut merupakan komunikasi politik.

2. Konsep Dakwah

Dakwah adalah menyeru/mengajak manusia ke jalan Allah, baik sebagaimana dalil tertulis maupun hukum sunatullah yang tersebar luas di alam semesta. Bahkan terdapat pandangan yang secara spesifik menyatakan bahwa dakwah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh pelakunya dalam hal menyeru/mengajak manusia ke jalan Allah.²⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa aspek intensi atau kesadaran dari subjek pelaku dakwah merupakan hal yang esensial agar *mad'uw* atau sasaran dakwah menjadi beriman dan bertakwa atau meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pada dasarnya tujuan dakwah adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia yang secara umum dapat mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya terang.²¹

Di sisi lain kegiatan dakwah juga dapat menghasilkan efek tertentu yang biasa dikenal dengan istilah *atsar* atau efek dakwah. Namun, hal ini kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari

¹⁶ Derwin Tambunan, "Politics and Power: A Critical Perspective on Legitimacy," *Journal of Social Political Sciences* 2, no. 4 (November 27, 2021): 328–41, <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i4.82>.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 10th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004).

¹⁸ Eva Hofmann et al., "Authorities' Coercive and Legitimate Power: The Impact on Cognitions Underlying Cooperation," *Frontiers in Psychology* 8, no. 1 (January 18, 2017): 1–15, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00005>.

¹⁹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005); Sidney Kraus and Dennis

Davis, *The Effects of Mass Communication on Political Behavior* (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1976).

²⁰ Syah Ahmad Qudus Dalimunthe, "Terminologi Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1415–20, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5436>.

²¹ Iftitah Jafar, "Tujuan Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus Dan Orientasi Dakwah Ilahi," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 34, no. 2 (2010): 285–302, <https://doi.org/10.30821/miqot.v34i2.208>.

para dai maupun akademisi dakwah, mengingat masih berkembangnya paradigma jarum hipodermik dalam dakwah yakni sejauh materi dakwah tersampaikan maka selesai sudah tugas dakwah. Padahal efek dakwah ini merupakan penentu kesuksesan dakwah, serta pijakan bagi dai dalam upaya dakwah berikutnya jika berparadigma dakwah keberlanjutan.²² Efek dakwah sendiri bisa dipahami dari sudut pandang psikologis atau sosiologis.²³ Dari sudut pandang psikologis, dakwah dapat memengaruhi motivasi individu agar menjadi/meningkat keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Swt.²⁴ Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, dakwah dapat mendatangkan perubahan sosial sebagai konsekuensi atas perubahan dalam nilai/norma sosial yang mengikuti perintah/larangan Allah Swt.²⁵

Pada perkembangannya, terdapat upaya membedakan antara dakwah kultural dengan dakwah struktural sebagai alternatif dalam metode berdakwah serta sebagai pembeda antara dakwah yang nonpolitik dengan dakwah yang bermuatan politik. Dakwah kultural dipahami sebagai upaya menggunakan elemen budaya lokal untuk diharmonisasikan dengan penyampaian nilai-nilai Islam terhadap individu/kelompok

secara langsung.²⁶ Sedangkan dakwah struktural dipahami sebagai upaya dakwah yang fokus pada perubahan sistem dalam struktur sosial dan politik masyarakat untuk mendukung nilai-nilai Islam, yang seringnya menggunakan instrumen kebijakan publik dan atau institusi politik dengan menargetkan perubahan pada tingkat institusional dan struktural.²⁷

Namun di antara konsep yang bersifat multidimensional itu, nyatanya memang konsep dakwah dan politik merupakan dua entitas yang berbeda. Hal ini pada umumnya dapat diidentifikasi dari tujuan/intensi pelaku, serta dampak perilaku. Jika individu berperan sebagai dai, maka ia menghendaki dan memang perilakunya berdampak pada peningkatan keimanan/ketakwaan pihak lain terhadap Allah Swt. Sedangkan jika individu berperan sebagai pelaku politik, maka ia menghendaki dan memang perilakunya berdampak pada perubahan kondisi kekuasaan yang ada di dalam organisasi/masyarakat.

²² Aminudin, "Konsep Dasar Dakwah," *Al-Munzir* 9, no. 1 (2016): 29–46, <https://doi.org/10.31332/am.v9i1.775>.

²³ Zakaria Syafe'i, "Sosiologi Dan Psikologi Dakwah," *ALQALAM* 19, no. 94 (September 30, 2002): 5–36, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i94.1006>.

²⁴ Indah Siti Romadhonah and Malik Ibrahim, "Komunikasi Dakwah Dalam Bingkai Teori-Teori Psikologi," *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (July 5, 2023): 77–88, <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.900>.

²⁵ Muzayyanah Yuliasih, "The Role of Dakwah in Community Empowerment in The Industrial Era 4.0," *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 5, no. 1 (August 2, 2022): 51–62, <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v5i1.122>.

²⁶ Tomi Hendra, Siti Amalia Nur Adzani, and Kori Lilie Muslim, "Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal," *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (June 24, 2023): 65–82, <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2660>; Asep Kamil Astori and Eka Octalia Indah Librianti, "Dakwah Kultural: Relasi Islam Dan Budaya Lokal," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (February 26, 2020): 179, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v3i2.1548.

²⁷ Siti Asiyah and Muh. Luthfi Hakim, "Strategi Konter Gerakan Islam Transnasional Melalui Dakwah Struktural," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (October 30, 2022): 211–24, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.507>.

3. Dakwah dan Politik dalam Sirah Nabawiyah

Kasus 1: Dakwah *Sirri* Nabi terhadap Pemeluk Islam Awal

Latar belakang peristiwa ini diawali ketika nabi menerima wahyu pertama kali QS. Al Alaq ayat 1-5. Setelahnya nabi cukup takut dengan kehadiran sosok Jibril dalam hidupnya, ditambah lagi dengan perintah dalam wahyu yang dibawa Jibril. Lantas turunlah perintah kepada nabi yang saat itu sedang berselimut karena diterpa ketakutan untuk memberi peringatan kepada orang lain yang tidak lain merupakan perintah berdakwah sebagaimana termaktub dalam QS. Al Muddassir ayat 1-7.²⁸

Sejak itulah nabi mulai berdakwah secara diam-diam dengan segmentasi dan menargetkan kepada kerabat/keluarga serta orang-orang terdekat karena nabi nilai mereka adalah orang yang paling mencintai kebenaran dan menjunjung kebaikan serta dapat menjaga kerahasiaan pesan dakwah ini terlebih dahulu sebelum nabi memutuskan untuk berdakwah secara terang-terangan sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94.²⁹

Selama kurang lebih tiga tahun melakukan dakwah *sirri*, nabi berhasil mengajak sekira enam puluh orang untuk mengikrarkan diri berislam menjadi bagian dari orang yang beriman. Seperempat di antaranya adalah perempuan. Juga belasan di antaranya merupakan budak/mantan budak dari kalangan papa. Di antara penduduk Mekkah yang menyatakan keislamannya adalah Khadijah, Waraqah, Abu Bakar, Ali bin Abi

Thalib, Sa'ad bin Abi Waqas, Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa orang hamba sahaya (termasuk Bilal bin Rabah).³⁰ Meski memang dalam proses dakwah *sirri* selama tiga tahun itu nabi tidak berdakwah seorang diri melainkan pula dibantu oleh yang terlebih dahulu berislam seperti Abu Bakar yang berhasil mengajak Talha bin Ubaidillah dan lainnya agar beriman.³¹

Fakta-fakta sejarah itu menunjukkan bahwa dorongan nabi ketika memberi peringatan kepada kerabat terdekatnya merupakan suatu bentuk pelaksanaan perintah Allah Swt yang disampaikan melalui Jibril. Selain itu sasaran *mad'uw* yang nabi pilih bukanlah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik di Makkah saat itu, di antaranya adalah para kerabat/keluarga terdekat juga para budak/mantan budak. Sulit untuk mengidentifikasi bahwa nabi memiliki tujuan untuk memperkuat pengaruh politiknya, melainkan cenderung nabi menghendaki agar mitra dakwah itu menjadi beriman kepada Allah Swt dan hari akhir.

Pada akhirnya kasus pertama ini hanya bisa dipahami sebagai peristiwa dakwah murni/tidak bersifat politik. Sebab secara intensi/tujuan nabi sebagai pelaku adalah untuk mengajak orang-orang terdekat beliau agar beriman kepada Allah Swt, serta hasil perilaku nabi itu nyatanya sukses mengajak enam puluhan orang terdekatnya agar beriman kepada Allah Swt. Sedangkan belum terdapat perubahan kondisi

²⁸ Ivan Sunata, "Dakwah Sirriyah Dan Jahriyah Perspektif Al-Quran," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (April 2, 2020): 24–36, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.23>.

²⁹ Alan Surya and Wahanani Mawasti, "Pemilihan Mad'uw Dakwah Sirri Nabi Perspektif Segmentasi Dan Targeting," *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu*

Dakwah 8, no. 1 (June 30, 2018): 99–120, <https://doi.org/10.55372/inteleksiapjd.v8i1.120>.

³⁰ Ivan Sunata, "Dakwah Sirriyah Dan Jahriyah Perspektif Al-Quran."

³¹ Surya and Mawasti, "Pemilihan Mad'uw Dakwah Sirri Nabi Perspektif Segmentasi Dan Targeting."

kekuasaan politik di kota Makkah khususnya dari perilaku nabi tersebut.

Kasus 2: Politik Nabi pada Penyusunan Piagam Madinah

Latar belakang peristiwa penyusunan Piagam Madinah ini diawali dari hijrahnya muslim Makkah ke Madinah, termasuk nabi. Sedangkan salah satu pendorong nabi berhijrah ke Madinah selain karena tekanan Quraisy Makkah namun juga karena dimintanya nabi sebagai penengah atas konflik yang terjadi antara Bani Aus dan Khazraj. Permasalahannya konflik tersebut telah terjadi selama seratusan tahun dalam bentuk memerangi sesamanya meski Aus dan Khazraj sebenarnya memiliki genealogi nasab yang sama dari bani Qaylah. Terakhir dalam perang Bu'ats, banyak pimpinan masing-masing bani yang meninggal, yang menyebabkan golongan muda masing-masing bani semakin khawatir kekuasaan mereka justru semakin melemah jika dibandingkan kaum Yahudi di Madinah. Padahal konflik ratusan tahun itu juga tidak lepas dari kontribusi Yahudi yang memosisikan diri lebih suka 'tunduk' pada kekuasaan bangsa Arab daripada menjadi penguasa utama di Madinah. Hal itulah yang membuat Bani Quraizah dan Nadhir menyokong pasukan Aus ketika memerangi Khazraj yang disokong oleh Bani Qainuqa. Fakta-fakta sejarah ini menandakan bahwa di Madinah sendiri sudah terdapat situasi konflik yang cukup kompleks, sehingga kehadiran nabi diharapkan dapat menjadi sosok juru damai.³²

³² Muhammad Burhanuddin, "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 5, no. 2 (October 9, 2019): 1–20, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.5233>; Fina Fatmah, "Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad SAW," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (September 8, 2018):

Di sisi lain, kehadiran kelompok Muhajirin sebagai pendatang dan Ansar sebagai penduduk lokal memiliki potensi konflik yang bersifat laten. Terbukti kelak konflik antara Muhajirin dengan Ansar benar-benar pecah yang terjadi pada peristiwa penyerobotan antrean pengambilan air minum di sumur Muraisi pasca ekspedisi Musthaliq. Padahal peristiwa yang terjadi hanya melibatkan Jahjah bin Sa'id al-Ghifari sebagai Muhajirin penuntun kuda Umar bin Khattab dengan Sinan bin Wabr al-Jahni yang merupakan kalangan Ansar. Namun eskalasi konflik menjadi semakin meningkat karena keduanya membawa-bawa konflik atas nama suku. Pun juga pemimpin kaum munafik, Abdullah bin Ubay juga semakin mengadudomba Muhajirin-Ansar dengan syairnya, "Gemukkan anjingmu, maka ia akan memakanmu!"³³ Meski memang peristiwa ini terjadi bertahun-tahun setelah Piagam Madinah tersusun, namun setidaknya dapat dipahami adanya konflik laten antara di dalam internal Islam itu sendiri memang benar-benar nyata.

Pemetaan situasi konflik yang bersifat manifes dan laten seperti itulah yang mungkin mendorong nabi untuk mengikat tidak hanya internal Islam saja melainkan pula pihak lain baik yang dibedakan demografinya dalam hal agama seperti Yahudi dan Nasrani, maupun dalam hal genealogi nasab seperti bani-bani yang ada

71–87, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1377>.

³³ Muhammad Hildan Azizi, "Komunikasi Krisis Internal Integratif Rasulullah Pada Pembagian Ghanimah Hunain," *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 3, no. 2 (March 24, 2022): 357–78, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v3i2.153>.

di Madinah.³⁴ Bukan dalam kerangka mengajak mukminin untuk lebih beriman, apalagi mengajak Yahudi dan Nasrani memeluk Islam, melainkan untuk menjadikan nabi menjadi pemimpin di Madinah dengan menyepakati batasan hak-kewajiban masing-masing pihak sebagai entitas politik tersendiri di Madinah.³⁵

Dampak dari tersusunnya Piagam Madinah secara sosial terdapat regulasi yang jelas bagi penduduk Madinah dalam berkehidupan sosial, hal ini dapat meminimalkan konflik yang terjadi sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat Madinah yang majemuk.³⁶ Bahkan sekalipun konflik tetap terjadi, namun secara politik, dengan adanya Piagam Madinah, nabi jadi memiliki legitimasi penuh dalam memutuskan perkara yang terjadi di Madinah.³⁷ Misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat antara muslim muda dengan sahabat yang lebih senior dalam menentukan posisi perang sebelum diputuskan perang luar kota di Uhud,³⁸ maupun ketika mengusir tiga kelompok besar Yahudi setelah ketiganya melakukan makar dalam wujud masing-masing, yakni Qainuqa' yang menentang kepemimpinan nabi di Madinah pasca peristiwa Muslimah yang dilecehkan

pedagang Yahudi, Nadhir yang berkomplot percobaan pembunuhan terhadap nabi setelah Islam mengalami kekalahan di perang Uhud, serta Quraiza yang berkomplot dengan pasukan Ahzab dalam membuka jalur masuk ke Madinah pada perang Khandaq.³⁹

Pada akhirnya kasus kedua ini hanya bisa dipahami sebagai peristiwa politik murni/tidak bersifat dakwah. Sebab secara intensi/tujuan nabi sebagai pelaku adalah untuk mendapatkan pengakuan legitimasi sebagai pemimpin di Madinah dalam memenuhi hak-kewajiban masing-masing bani dan pemeluk agama yang ada di Madinah. Melalui sensus ternyata ada 10.000 penduduk terdiri atas 1.500 kaum Muslimin, 4.000 Yahudi, dan 4.500 kaum musyrikin dapat menghasilkan konsensus bersama disebut konstitusi pertama di muka bumi yang diumumkan oleh sebuah negara kota dengan batas-batas secara fisik keempat sudutnya.⁴⁰ Dengan jumlah kaum Muslimin hanya 15% dari jumlah penduduk Madinah waktu itu, membuktikan bahwa Nabi berdasarkan fakta tersebut (*ipso facto*) berhasil melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain hasil perilaku nabi dalam penyusunan Piagam Madinah nyatanya bukan mempertebal keimanan kaum muslim, serta

³⁴ Amiroton Sholikhah, "Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah Dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik)," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, no. 1 (January 23, 2017): 87–102, <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>.

³⁵ Enur Nurjanah, "Madinah Charter as a Pluralistic Community Structure," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (December 18, 2019): 210–14, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913>.

³⁶ Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (October 20, 2016): 269–95, <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>.

³⁷ A Miftahul Amin, "Pembangunan Kesatuan Dogma Dan Politik Dalam Piagam Madinah," *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (March 1, 2018): 45–73, <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3347>.

³⁸ Ahmad Agis Mubarok, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran: (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 23, 2019): 147–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

³⁹ Fatmah, "Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad SAW."

⁴⁰ Ali Bulac, "Piagam Madinah," in *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, ed. Charlez Kurzman (Jakarta: Paramadina, 2001), 265–66.

bukan pula menjadikan golongan Yahudi, Nasrani, bahkan yang masih menganut paganisme menjadi berislam. Melainkan justru memberikan kepastian hukum dari hadirnya regulasi konstitusional dalam menjaga hak-kewajiban masing-masing pihak, serta secara politik memberikan pengakuan penuh legitimasi yang dimiliki nabi sebagai pimpinan Madinah. Dalam kaitannya, Nabi Muhammad di Madinah berhasil memperluas klien politisnya melalui perjanjian persekutuan dengan suku-suku lokal Yahudi dan Arab membentuk sebuah himpunan (*ummah* dalam pengertian sosio-politis kesukuan yang berkat Alquran kemudian berkembang menjadi anggitan komunitas spiritual *transhistoris*) yang anggotanya mewajibkan diri untuk saling melindungi, menjalin keamanan.⁴¹ *Ummah* tersebut beroperasi sebagai satu kesatuan politik dan Nabi Muhammad bertindak sebagai arbiter tertinggi yang menggantikan tradisi Arab lama dengan sistem peradilan terstruktur dalam menghadapi ketidakadilan.⁴²

Kasus 3: Politik Nabi pada Penyusunan Perjanjian Hudaibiyah

Sejak awal keberangkatan, nabi sudah memahami bahwa kedatangan muslim Madinah ke Makkah di bulan haram (Dzulqa'dah) untuk melaksanakan ibadah umroh akan membuat Quraisy Makkah mengalami situasi dilema/simalakama. Di

satu sisi, jika Quraisy memerangi muslim yang bertujuan ibadah, maka Quraisy akan menjadi *public enemy* bagi bangsa Arab lainnya karena telah menodai bulan haram. Sedangkan di sisi lain, jika umat muslim diizinkan umroh memasuki Makkah, maka akan tercoreng kewibawaan Quraisy yang telah memerangi muslim sejak era perang Badar, Uhud, hingga Khandaq.⁴³

Intensi nabi tersebut semakin terlihat dari kebijakan nabi mengenakan pakaian ihram, dan melarang muslim Madinah membawa peralatan perang melainkan hanya diperbolehkan membawa pedang tersarung (yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan kurban), serta hanya diperbolehkan membawa puluhan hewan kurban (bukan yang dipersiapkan untuk peperangan).⁴⁴ Kebijakan ini nabi terapkan semata agar menutup celah bagi Quraisy untuk membuat-buat alasan yang sah dalam memerangi muslim. Bahkan ketika Quraisy mengganggu dengan melakukan pelemparan batu ke arah perkemahan muslim saat malam hari di lembah Hudaibiyah, nabi meminta muslim untuk tidak membalas, dengan begitu Quraisy masih belum punya alasan untuk memerangi muslim.⁴⁵ Bahkan ketika berkembang isu kematian Usman bin Affan yang diutus untuk berunding ke Makkah, nabi meminta muslim berbaiat (dikenal dengan peristiwa Baiat Ridwan) untuk tidak meninggalkan tempat

⁴¹ M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik Alquran: Mencurigai Makna Tersembunyi Di Balik Teks* (Bekasi: Gugus Press, 2002).

⁴² Firas Alkhateeb, *Lost Islamic History (Merebut Kembali Kejayaan Peradaban Islam)* (Jakarta: Zahira, 2014).

⁴³ Sidiq Ahmadi, "Hudaibiyah Treaty as a Model of Compliance to International Agreement in Islamic Perspective," in *The Challenge of Social Sciences in a Changing World* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 867–74.

⁴⁴ Ali Syahbana Siregar, "Negosiasi Rasulullah Saw Dalam Mewujudkan Perjanjian Hudaibiyah," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (April 12, 2023): 118–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.458>.

⁴⁵ Abu Haif, "Perjanjian Hudaibiyah (Cermin Kepiawaian Nabi Muhammad Saw. Dalam Berdiplomasi)," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 1, no. 1 (May 9, 2014): 119–31, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v1i01.673>.

itu, uniknya nabi tidak meminta muslim untuk menyerang Quraisy Makkah.⁴⁶ Hal-hal itu semakin menguatkan analisis bahwa nabi memang sedang berupaya untuk tidak memberi celah sedikit pun bagi Quraisy agar memiliki alasan yang dibenarkan untuk memerangi muslim.

Di sisi lain, dampak dari disusunnya perjanjian Hudaibiyah tidak serta merta langsung meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim atau bahkan membuat Quraisy Makkah menjadi berislam, melainkan meningkatkan pengaruh politik Islam sebagai suatu entitas politik di tanah Hijaz pada masa itu.⁴⁷ Sebab pengaruh politik Islam cukup melemah pasca kekalahan pada Perang Uhud yang membuat kelompok-kelompok lain yang sejak awal sudah tidak suka dengan kehadiran Islam mulai berani secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap Islam, yakni dengan munculnya upaya serangan-serangan dan tipu muslihat dari bani-bani sekitar Madinah seperti Bani Musthaliq yang berani merencanakan penyerangan terhadap muslim langsung ke Madinah, serta pembunuhan utusan dai terbaik pada peristiwa Ra'ji dan Bi'ir Maunah.⁴⁸ Oleh karena itulah Perjanjian Hudaibiyah ini justru diklaim sebagai suatu kemenangan yang nyata karena pengaruh politik Islam jauh sangat menguat.⁴⁹

Kecil kemungkinan Quraisy akan melanggar pasal gencatan senjata selama sepuluh tahun yang telah disepakati, sehingga nabi bisa fokus terhadap program-program dakwah atau penaklukan geopolitik wilayah Utara seperti tanah Khaibar.⁵⁰ Sedangkan di sisi lain, Quraisy yang selama puluhan tahun kekuasaannya telah cukup menghegemoni di tanah Hijaz justru 'bersedia' membangun kesepakatan damai dengan kelompok Islam yang nyatanya belum berusia sepuluh tahun dan masih dianggap sebagai entitas politik yang lemah. Hal inilah yang membuat kelompok-kelompok lain yang membenci Islam jadi khawatir dengan kekuatan Islam sebenarnya, begitu juga membuat kelompok lain yang sejak awal sudah ingin membangun kerja sama dengan Islam (namun terhalang hubungan diplomatiknya dengan Quraisy) menjadi berani secara terang-terangan mendukung Islam seperti halnya Bani Khuza'ah.⁵¹ Melalui perjanjian Hudaibiyah setidaknya dapat mengurangi kontak fisik di medan perang, sehingga tercipta suasana dialogis saling mengunjungi mengenal Islam di masa damai.⁵² Meskipun penuh dinamika, Umar bin Khatthab paling terang-terangan menunjukkan kekecewaan,⁵³ dan sebagian Muslim juga tidak suka dengan syarat-syaratnya, pada kisah selanjutnya membuktikan kemenangan Islam itu dapat tercapai. Sebagaimana mimpi Rasulullah dalam surat Al-Fath ayat 27-28 menunjukkan puncak kemenangan Islam itu tercapai

⁴⁶ Abu Haif.

⁴⁷ May Hasanah et al., "Strategi Komunikasi Politik Rasulullah SAW Dalam Proses Perjanjian Hudaibiyah," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 3 (May 28, 2024): 208–17, <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/731>.

⁴⁸ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, ed. Ali Audah, 39th ed. (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2010).

⁴⁹ Hasanah et al., "Strategi Komunikasi Politik Rasulullah SAW Dalam Proses Perjanjian Hudaibiyah."

⁵⁰ Muhammad Basri, Rizka Hasanah Nasution, and Anugrah Satria Darmawan, "Analysis of Important Events in the Early Journey of Islam Through the Khaibar War and Wadi Al-Quran," *EDUCTUM: Journal Research* 3, no. 1 (January 1, 2024): 34–44, <https://doi.org/10.56495/ejr.v3i1.449>.

⁵¹ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*.

⁵² Muhammad Fethullah Gulen, *Cahaya Abadi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Kebanggaan Umat Manusia*, 2nd ed. (Depok: Republika Penerbit, 2011), 182–83.

⁵³ Gulen, 175–76.

setelah dua tahun pasca perjanjian Hudaibiyah ini (828-630 M).⁵⁴

Pada akhirnya kasus ketiga ini hanya bisa dipahami sebagai peristiwa politik murni/tidak bersifat dakwah. Bahwa intensi nabi dalam penyusunan perjanjian Hudaibiyah memang murni untuk membangun kesepakatan damai daripada peperangan dengan pihak yang telah mengusir muslim dari Makkah dan berkali-kali memerangi muslim Madinah pada perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Boleh jadi ada implikasi tidak langsung dalam mengenalkan ajaran Islam sebagai agama cinta damai kepada penduduk Makkah melalui pengalaman hidup bermasyarakat yang sebelumnya penuh konflik dan kejahatan. Menjadi pengalaman hidup menjumpai berbagai perilaku keagamaan umat Islam Madinah melalui berwudhu, kumandang azan, barisan saf jemaah salat dan kekhusyukan orang-orang di Masjid serta seruan Islam seperti suasana itu berpindah di Makkah.⁵⁵ Setahun sejak perjanjian ini dijalankan, umat Islam dapat leluasa mengunjungi kota Makkah dan berlanjut menjadi dialog intensif dengan penduduk Makkah yang masih kafir.⁵⁶ Namun, Nabi tidak hendak mengajak Quraisy Makkah untuk berislam dalam perjanjian Hudaibiyah ini, terlebih jika dipahami dari salah satu pasal dalam perjanjian yang mewajibkan muslim Madinah mengembalikan penduduk Makkah yang pergi ke Madinah tanpa seizin

walinya, sebagaimana yang dialami oleh Abu Jandal bin Suhail.

Kasus 4: Nabi Berdakwah Politik Mengirimkan Surat kepada Raja-Raja

Faktor yang melatarbelakangi peristiwa ini adalah kejadian setelah Perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan, yakni nabi yang sudah merasa cukup tenang karena sangat kecil kemungkinan gangguan dakwah dari pihak Quraisy Makkah (wilayah geopolitik selatan Madinah), menjadikan nabi merasa perlu untuk memperluas wilayah dakwah ke wilayah geopolitik utara (Romawi dan/atau Mesir) dan timur (Persia) sebagai entitas politik yang sangat berpengaruh di masa itu.⁵⁷ Sebenarnya bisa saja nabi mengirimkan dai-dai ke wilayah-wilayah tersebut, namun mungkin dirasa kurang efisien sedangkan *cost* pengiriman dai di wilayah yang cukup jauh sangat besar. Di sisi lain, penerapan sistem politik monarki masih sangat kental pada masa itu, termasuk hubungan antara negara dengan agama yang sangat berkontribusi dalam pembangunan negara agama sebagaimana contoh Raja Habasyah yang Kristen membuat mayoritas rakyatnya juga menganut Kristen. Sehingga terdapat potensi yang cukup besar jika raja sebagai pemimpin masyarakat di wilayah tertentu berislam, maka akan diikuti oleh banyak rakyatnya.⁵⁸ Oleh karena itu, nabi memang berkehendak agar para raja yang mendapatkan surat bersedia memeluk Islam lalu kemudian bersedia menjalin hubungan diplomatik yang positif dengan Islam di Madinah.

⁵⁴ Gulen, 261–62.

⁵⁵ Gulen, 183.

⁵⁶ Gulen, 238.

⁵⁷ Agusti Alfi Nurul Insani, "Dakwah Politik Nabi Muhammad Kepada Raja Heraklius, Kisra Abrawaiz, Muqauqis, Dan Najasyi," *Islamic Communication Journal* 4 (2013): 12–26.

⁵⁸ Zawawi Yusoff, "Mesej Dakwah Para Rasul (a.s.) Kepada Golongan Pembesar Negara," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 8 (June 2014): 86–112, <https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/119>.

Berdasarkan hal itu nabi mengirim surat kepada Raja Najasyi di Habasyah, Raja Mauquqis di Mesir, Raja Kisra di Persia, Kaisar Heraklius di Romawi, Al Munzir di Bahrain, Haudan bin Ali Hanafi di Yamamah, Al Haris di Damaskus, serta Raja Oman.⁵⁹ Jika dirincikan secara umum, maka surat nabi itu berisi suatu ajakan beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, doa keselamatan bagi umat muslim, pernyataan bahwa Isa bukan Tuhan, informasi bahwa seluruh agama semitik merupakan bentuk pengesaan terhadap Tuhan, serta Islam sebagai agama yang diakui Allah.⁶⁰

Upaya dakwah nabi melalui surat itu mendapat respons positif dari Raja Najasyi yang menyatakan keislamannya. Juga dengan berislamnya raja di Habasyah itu menimbulkan efek multiplier secara politik dalam internal kerajaan Habasyah itu sendiri, yakni munculnya gonjang-ganjing karena para menterinya yang notabene beragama Kristen menolak islamisasi jalur negara agama di Habasyah. Upaya pemakzulan Raja Habasyah itu sampai-sampai membuat sang raja menyiapkan kapal agar umat muslim yang sedang bermukim di Habasyah dapat kembali ke Madinah dengan selamat. Namun upaya pemakzulan itu berujung pada kegagalan, Najasyi berkuasa hingga akhir hayatnya sebagaimana kisah mengenai nabi dan umat muslim di Madinah yang melakukan salat gaib sepeninggal Raja Najasyi.⁶¹

Selain itu, respons positif Raja Mauquqis terhadap ajakan dakwah nabi tidak terlepas pula dari faktor krisis keberagamaan. Bahwa Raja Mauquqis adalah penguasa di bawah pemerintahan Romawi. Sebelum menjadi raja Mesir, Mauquqis hanyalah wakil jenderal kekaisaran Imperium Romawi. Mengingat Mauquqis berasal dari Qibthi, Raja Heraklius memerintahkannya untuk memimpin Mesir setelah John the Almoner dibunuh. Sehingga Heraklius mengangkat Mauquqis untuk memimpin Mesir bukan karena masalah agama, tetapi karena dia memiliki kekuasaan atas bagian dari Imperium Romawi, yaitu Mesir. Karena bukan bertujuan mempertahankan agama Kristen di bawah kekuasaan Romawi, saat surat nabi yang berisi dakwah Islamiyah datang, Raja Mauquqis sebagai raja Mesir menjadi memeluk Islam.⁶²

Sedangkan kemenangan atas kekaisaran Sasaniyah di Iran, menjadikan Kaisar Heraklius dan rakyatnya, orang-orang Arizon, yang merupakan penganut agama Kristen Arius-Athanasius, berada di atas angin. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh Romawi adalah Mesir yang dipimpin Raja Mauquqis beragama Kristen Ortodoks. Di sisi lain, Raja Najasyi dari Habasyah beragama Kristen-Nestorius; hal ini menjadikan umat Nasrani terpecah menjadi tiga kelompok, yakni Kristen Ortodoks (yang dianut Muquqis), Kristen-Nestorius (yang dianut Najasyi), dan Arius-Athanasius (yang

⁵⁹ Akhmad Saufan, "Strategi Dan Diplomasi Perang Rasulullah," *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (Juni 2015): 107–34, <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.206>.

⁶⁰ Ubaidillah Ubaidillah, "Surat Dakwah Nabi Muhammad Saw (Analisis Tematik Stas Surat-Surat Nabi Muhammad Kepada Para Raja)," *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 13, no. 1 (January 1, 2015): 28–46, <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i1.487>.

⁶¹ Saufan, "Strategi Dan Diplomasi Perang Rasulullah."

⁶² Bobby Rachman Santoso, Umul Baroroh, and Asep Dadang Abdullah, "SURAT SEBAGAI MEDIA DAKWAH: Studi Atas Praktek Dakwah Rasulullah Saw Terhadap Raja Heraklius, Kisra Abrawaiz, Muquqis, Dan Najasyi," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 1 (August 16, 2017): 118–38, <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1255>.

dianut Heraklius). Kondisi Nasrani yang lemah dan tidak dapat bertahan karena perpecahan keyakinan, menjadikan agama Islam cepat menyebar pada hari-hari awal penaklukan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengirim surat dakwah kepada pembesar di luar Jazirah Arab pada saat itu.⁶³ Raja-raja lain yang menerima surat nabi ada yang menolak dengan tegas seperti raja di Romawi yang sebenarnya menerima ciri-ciri kenabian Muhammad Saw namun tidak bersedia kehilangan kekuasaan yang telah didapatkannya, lebih-lebih baru saja ia mendapatkan kemenangan terhadap Persia.⁶⁴ Hal ini menandakan dakwah nabi tidak sepenuhnya sukses karena masih terdapat sasaran dakwah yang tidak bersedia kehilangan kekuasaannya, sehingga secara tidak langsung berdampak pula secara politik bagi Islam yakni gagalnya membangun hubungan diplomatik antara Islam sebagai entitas politik kepada kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu.

Pada akhirnya kasus keempat ini bisa dipahami sebagai peristiwa dakwah politik/struktural. Bahwa intensi awal nabi dalam mengirim surat kepada para raja adalah agar raja-raja itu bersedia memeluk Islam, namun bukan tidak mungkin nabi juga menyadari hubungan agama dan negara jika seorang raja memeluk suatu agama tertentu, sehingga bukan tidak mungkin bahwa nabi juga berharap dengan keislaman para raja akan meningkatkan efisiensi islamisasi di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, dampak pengiriman surat itu berhasil membuat salah satu raja yakni Raja

Habasyah untuk menyambut seruan berislam, meski secara politik berkonsekuensi pada instabilitas politik di kerajaan Habasyah karena para menterinya menolak islamisasi di negeri Habasyah.

Kasus 5: Politik Dakwah Dialik Penaklukan Mekkah

Pelanggaran pasal gencatan senjata sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Quraisy dalam menyokong Bani Bakr ketika memerangi Bani Khuza'ah yang memiliki kerja sama politik dengan Islam, merupakan faktor pencetus yang mendorong nabi berupaya menaklukkan Makkah. Di satu sisi kekuatan militer Quraisy diperkirakan sekurangnya dari 3 ribu pasukan, juga telah tertutup kemungkinan permintaan bala bantuan Quraisy kepada kelompok lain — sebagaimana dalam perang Ahzab sebelumnya—, sedangkan di sisi lain Islam mampu memobilisasi sejumlah 10 ribu pasukan dengan perlengkapan perang lengkap, kondisi inilah yang mungkin menjadikan nabi memilih jalur militer dalam upayanya menaklukkan Makkah. Strategi merahasiakan serangan agar bisa memberikan efek kejutan kepada Quraisy, sebagaimana kisah sahabat Hatib bin Balta'ah yang diperingatkan karena hendak membocorkan rencana nabi, semakin memperjelas kehendak nabi untuk menancapkan pengaruh politik Islam di Makkah lewat jalur militer.⁶⁵

Meski demikian, nabi tetap memberikan amnesti umum terhadap Quraisy Makkah

⁶³ Rachman Santoso, Baroroh, and Dadang Abdullah.

⁶⁴ Fauziah Ramdani, "Komunikasi Dakwah Rasulullah: Telaah Surat-Surat Rasulullah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): 1–14.

⁶⁵ Salmah Intan, "FATHUL MAKKAH (Keteguhan Nabi Muhammad Saw. Menjalankan Perjanjian)," *Al-Hikmah*

21, no. 2 (January 15, 2020): 51–65, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/11398.

yang tidak melakukan perlawanan melainkan dengan tetap berada di rumah masing-masing, rumah Abu Sufyan, atau Kakbah ketika pasukan muslim masuk membanjiri kota Makkah.⁶⁶ Bahkan ketika nabi mengutus kelompok-kelompok pasukan untuk memastikan posisi politik bani-bani yang menduduki sekitar Makkah, terjadi peristiwa penumpahan darah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, namun lagi-lagi respons nabi bukan mengizinkan penumpahan darah itu melainkan dengan membayarkan *diyath* terhadap kematian anggota Bani Jazimah.⁶⁷ Fakta sejarah itu dapat menambah asumsi bahwa penaklukan Makkah yang nabi lakukan bukan sekedar murni urusan politik militer melainkan juga suatu bentuk dakwah *bil haal* dengan mencontohkan cara berpolitik militer yang baik dan benar ketika menghadapi lawan politiknya. Sebab sangat sulit ditelusuri pertimbangan nabi dalam pemberian amnesti umum dan pembayaran *diyath* pada peristiwa tersebut, selain merupakan bentuk kehati-hatian nabi dalam menjalankan program politiknya. Padahal pengampunan itu jelas-jelas nabi berikan kepada lawan-lawan politik yang dahulu pernah merencanakan pembunuhan nabi, mengusir muslim dari Makkah, bahkan memperlakukan jenazah paman nabi dengan tidak layak. Seharusnya memberangus Quraisy Makkah akan sangat beralasan bagi nabi, serta tidak akan berefek pada pengaruh politik Islam, namun lagi-lagi nabi tidak melakukannya. Maka tidak ada

alasan selain pemberian contoh berpolitik yang baik bagi umat muslim bahkan hingga masa ini yakni dengan mengedepankan etika khususnya pertimbangan kemanusiaan.⁶⁸ Dengan demikian, sikap lapang dada dan pengampunan yang nabi umumkan kepada penduduk Makkah sesaat sebelum penaklukan membuat hati penduduk Makkah terbuka untuk memeluk Islam sebagai agama mereka.⁶⁹

Lalu hasil dari penaklukan Makkah ini menjadikan Islam memiliki pengaruh politik yang sangat powerful di tanah Hijaz, mengingat Makkah merupakan kota pusat peradaban tanah Arab masa itu. Dari sisi internal Islam sendiri, Quraisy Makkah yang sebelumnya sangat memusuhi Islam, mendapatkan pengampunan massal atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya terhadap nabi maupun muslim. Selain itu, mereka juga berbondong-bondong menyatakan diri sebagai muslim,⁷⁰ meski memang satu-satunya faktor yang menjadikan mereka bersedia menjadi muslim adalah pengaruh politik Islam yang sudah sedemikian kuat, sehingga mereka tidak bisa melawan balik upaya penaklukan Makkah yang dilakukan nabi. Fakta keterpaksaan berislam ini dapat dibuktikan dalam peristiwa Perang Hunain, bahwa Quraisy Makkah yang baru berislam pasca penaklukan merupakan mereka yang pertama kali berlari dari medan perang ketika mendapat serangan mendadak dari Bani Thaif, serta mereka yang masih nabi

⁶⁶ M. Yakub Amin, "Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW Pada Peristiwa Fathu Mekkah," *Politea* 4, no. 1 (June 26, 2021): 109, <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10527>.

⁶⁷ Abeeblahi Obalowu Issah and Adibah Binti Abdul Rahim, "Contextual and Critical Analysis of the Hadith of Khalid Bin Al-Walid's Troop to Bani Jadhimah," *International Journal of Islamic Khazanah* 13, no. 1

(January 31, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.15575/ijik.v13i1.21471>.

⁶⁸ Abdur Rouf Hasbullah, "Konstruksi Nilai-Nilai Dalam Peristiwa Fathu Makkah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (July 31, 2022): 165–80, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i2.3098>.

⁶⁹ Gulen, *Cahaya Abadi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Kebanggaan Umat Manusia*, 369.

⁷⁰ QS. An-Nashr (110): 1-3.

anggap perlu dikuatkan keimanannya dengan bagian harta rampasan perang yang lebih besar jika dibandingkan Ansar.⁷¹ Sedangkan dari sisi eksternal Islam, dari kesuksesan penaklukan Makkah (selain juga berikutnya kemenangan dalam Perang Hunain), menjadikan mayoritas entitas politik lain di dataran Arab masa itu mulai mengirim delegasi/utusan guna menjalin hubungan ideologis dengan menyatakan keislamannya terhadap Islam di Madinah seperti Bani Tamim, Hanifa, Amir, dan lainnya;⁷² maupun juga kelompok yang menjalin hubungan diplomatik politik dengan bersedia membayar jizyah kepada nabi seperti Nasrani Najran.⁷³

Pada akhirnya kasus kelima dan yang terakhir ini bisa dipahami sebagai peristiwa politik dakwah. Bahwa intensi awal nabi dalam menaklukan Makkah adalah untuk memperkuat pengaruh politik Islam sebagai entitas politik di tanah Hijaz maupun dataran Arab secara umum. Namun dalam upaya penaklukan itu, nabi berusaha memberikan contoh berpolitik yang baik dengan memberikan pengampunan terhadap lawan-lawan politiknya, sehingga penaklukan itu bersifat multidimensional tidak hanya bersifat politik melainkan pula dakwah bil haal spesifik pada contoh berpolitik yang baik. Analisis itu diperkuat pula pada bagian dampak penaklukan yang secara politik benar-benar memperluas pengaruh politik kelompok Islam, serta juga memengaruhi kelompok-kelompok lain

untuk menyatakan diri berislam setelah mengambil hikmah atas contoh politik etis nabi terhadap lawan-lawan politiknya.

4. Pembahasan Multi-kasus Terpilih dalam Sirah Nabawiyah

Berdasarkan analisis multi-kasus terhadap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam *Sirah Nabawiyah*, dapat dipahami bahwa politik dan dakwah adalah dua konsep yang mewakili dua realitas yang berbeda. Pada ruang lingkup analisis perilaku (bukan secara sistemik), perilaku politik dan kegiatan dakwah dapat dibedakan dari intensi pelaku dan dampak perilaku itu sendiri.

Hal itu dapat dipahami dalam kasus ketika nabi mengajak kerabat terdekatnya untuk berislam, intensinya jelas agar sasaran bersedia menjadi mukminin, dampaknya pun tidak sampai kepada pengaruh politik Muhammad di Makkah. Sedangkan ketika nabi menyusun Piagam Madinah intensinya jelas agar nabi memiliki legitimasi penuh dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat majemuk, sehingga dampaknya bukan menjadikan kaum Yahudi, Nasrani, bahkan yang masih menganut paganisme menjadi berislam. Begitu juga ketika nabi Menyusun Perjanjian Hudaibiyah karena memiliki intensi memperkuat pengaruh politik di tanah Hijaz, sehingga dampaknya bukan menjadikan Quraisy Makkah berislam.

⁷¹ Azizi, "Komunikasi Krisis Internal Integratif Rasulullah Pada Pembagian Ghanimah Hunain."

⁷² Abbas Ahmadvand, Hadi Yaqubzadeh, and Mohammad Mehdi Babapour Golafshani, "Study of Imāmiyya Delegatography in the First Islamic Centuries (with Emphasis on Two Case Studies: The Delegates Sent to the Prophet, the Arab Delegates Sent to the Prophet)," *Iranian Journal for the History of Islamic*

Civilization 48, no. 1 (2015): 93–110, <https://doi.org/10.22059/jhic.2017.240764.653800>.

⁷³ Mohammad Ghazali et al., "Jizyah Sebuah Jaminan Dalam Peradaban Islam Sebagai Tinjauan Historis," *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 2 (January 2, 2023): 168–75, <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/9793>.

Jika Nabi Muhammad Saw hanya dipahami sebagai penyampai wahyu Allah Swt, maka segala perilakunya hanya akan diidentifikasi sebagai kegiatan dakwah, bahkan ketika sedang berperang. Memang benar bahwa tugas kenabian adalah sebagai penyampai wahyu, namun dalam kajian perilaku tetap harus diidentifikasi kasus-kasus spesifik terkait intensi dan dampak perilakunya. Namun di sisi lain, konsep politik dan dakwah memang masih memiliki ruang hubungan yang saling beririsan antara satu dengan lainnya, yakni terdapat kegiatan dakwah yang disadari dapat berdampak politik, namun terdapat pula perilaku politik yang disadari dapat berdampak dakwah.

Sebagaimana dalam kasus nabi berkirim surat kepada raja-raja yang isi pesannya mengajak para raja untuk berislam, meski intensi nabi adalah agar para raja beriman pada Allah dan rasul-Nya, namun nabi setidaknya dapat menyadari bahwa jika para raja itu bersedia untuk berislam, maka akan memengaruhi hubungan agama dengan negara di wilayah yurisdiksi para raja itu berkuasa. Terbukti Raja Habasyah yang saat itu menyambut baik untuk berislam berdampak pemakzulan karena para menteri berbeda pendapat tentang islamisasi di Habasyah. Selain itu juga dalam kasus pemberian amnesti umum pada peristiwa penaklukan Makkah, intensi nabi memang untuk menguasai kembali wilayah Makkah yang sangat dipertahankan oleh Quraisy, namun upaya amnesti itu tidak menutup kemungkinan dapat mempertebal keimanan umat muslim maupun memengaruhi kalangan non Muslim untuk berislam karena terinspirasi dari hikmah di balik contoh baik nabi ketika berpolitik yakni dengan memaafkan dan mengampuni lawan-lawan politiknya sekalipun ia

termasuk orang yang sangat gencar memerangi Islam bahkan termasuk yang secara personal telah memperlakukan jenazah paman nabi secara tidak layak saat Perang Uhud.

Simpulan

Politik adalah kegiatan pengelolaan kekuasaan di tengah masyarakat/organisasi. Di dalam kegiatan tersebut, terdapat perilaku-perilaku di mana subjek memiliki tujuan dan/atau perilakunya dapat berdampak terhadap suatu kondisi kekuasaan politik tertentu. Sedangkan dakwah adalah upaya mengajak manusia menjalankan perintah-Nya dan/atau menjauhi larangan-Nya. Perbedaan keduanya dapat diidentifikasi pada objek perilakunya, bahwa perilaku politik adalah pengelolaan kekuasaan sedangkan pada kegiatan dakwah yang dikelola adalah keimanan/ketakwaan.

Namun dalam kenyataan, memungkinkan seseorang dapat melakukan kegiatan politik dan dakwah dalam satu kesempatan yang sama. Sebab dalam ilmu dakwah terdapat konsep dakwah bil haal, di mana ketika seseorang berperilaku politik yang baik/beretika, maka dapat memberikan contoh bagi orang lain agar berpolitik sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga terdapat konsep politik dakwah yakni berpolitik sambil berdakwah, juga terdapat konsep dakwah politik/struktural yakni berdakwah yang disadari dampaknya juga dapat bersinggungan dengan kekuasaan politik.

Kajian ini telah dibatasi pada asumsi konseptual bahwa pembeda sifat di balik perilaku terletak pada variabel intensi pelaku dan dampak perilakunya. Terhadap

asumsi ini masih dapat dilakukan kajian lebih lanjut, khususnya tidak terhadap kasus-kasus dakwah melainkan kasus secara umum. Begitu juga pilihan kasus yang dikaji dalam artikel ini telah dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan kejelasan batasan/irisan antara konsep politik dan dakwah di dalamnya, memungkinkan

terdapat kasus-kasus lain yang dapat dikaji untuk menguatkan temuan kajian ini. Selain itu dapat pula dilakukan kajian mengenai varian bentuk-bentuk hubungan dalam konsep dakwah politik atau politik dakwah, sehingga dapat memperkaya kemungkinan-kemungkinan bentuk kombinasi keduanya.

Bibliografi

- Abu Haif, Abu. "Perjanjian Hudaibiyah (Cermin Kepiawaian Nabi Muhammad Saw. Dalam Berdiplomasi)." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 1, no. 1 (May 9, 2014): 119–31. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v1i01.673>.
- Ahmadi, Sidiq. "Hudaibiyah Treaty as a Model of Compliance to International Agreement in Islamic Perspective." In *The Challenge of Social Sciences in a Changing World*, 867–74. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Ahmadvand, Abbas, Hadi Yaqubzadeh, and Mohammad Mehdi Babapour Golafshani. "Study of Imāmiyya Delegatography in the First Islamic Centuries (with Emphasis on Two Case Studies: The Delegates Sent to the Prophet, the Arab Delegates Sent to the Prophet)." *Iranian Journal for the History of Islamic Civilization* 48, no. 1 (2015): 93–110. <https://doi.org/10.22059/jhic.2017.240764.653800>.
- Alkhateeb, Firas. *Lost Islamic History (Merebut Kembali Kejayaan Peradaban Islam)*. Jakarta: Zahira, 2014.
- Amin, A Miftahul. "Pembangunan Kesatuan Dogma Dan Politik Dalam Piagam Madinah." *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (March 1, 2018): 45–73. <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3347>.
- Amin, M. Yakub. "Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW Pada Peristiwa Fathu Mekkah." *Politea* 4, no. 1 (June 26, 2021): 109. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10527>.
- Aminudin. "Konsep Dasar Dakwah." *Al-Munzir* 9, no. 1 (2016): 29–46. <https://doi.org/10.31332/am.v9i1.775>.
- Asiyah, Siti, and Muh. Luthfi Hakim. "Strategi Konter Gerakan Islam Transnasional Melalui Dakwah Struktural." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (October 30, 2022): 211–24. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.507>.
- Astori, Asep Kamil, and Eka Octalia Indah Librianti. "Dakwah Kultural: Relasi Islam Dan Budaya Lokal." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (February 26, 2020): 179. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v3i2.1548.
- Azizi, Muhammad Hildan. "Komunikasi Krisis Internal Integratif Rasulullah Pada Pembagian Ghanimah Hunain." *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 3, no. 2 (March 24, 2022): 357–78. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v3i2.153>.
- Basri, Muhammad, Rizka Hasanah Nasution, and Anugrah Satria Darmawan. "Analysis of Important Events in the Early Journey of Islam Through the Khaibar War and Wadi Al-Quran." *EDUCTUM: Journal Research* 3, no. 1 (January 1, 2024): 34–44. <https://doi.org/10.56495/ejr.v3i1.449>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 10th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004.
- Bulac, Ali. "Piagam Madinah." In *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang*

- Isu-Isu Global*, edited by Charlez Kurzman, 265–66. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Burhanuddin, Muhammad. "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 5, no. 2 (October 9, 2019): 1–20. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimauiyyah.v5i2.5233>.
- Dalimunthe, Syah Ahmad Qudus. "Terminologi Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1415–20. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5436>.
- Day, Syamsul Bachri. "Hubungan Politik Dan Dakwah." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 1 (June 10, 2005): 7–16. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i1.1171>.
- Fatimah, Siti. "Dakwah Struktural: Studi Kasus Perjanjian Hudaibiyah." *Jurnal Dakwah* 10, no. 01 (2009): 67–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jd.2009.101>.
- Fatmah, Fina. "Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (September 8, 2018): 71–87. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1377>.
- Ferris, Gerald R, B Parker Ellen, Charn P McAllister, and Liam P Maher. "Reorganizing Organizational Politics Research: A Review of the Literature and Identification of Future Research Directions." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 6, no. 1 (January 21, 2019): 299–323. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015221>.
- Fikri, Zainal. "Politik Islam Antara Dakwah Dan Orientasi Kekuasaan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 26 (2017): 55–60.
- Gulen, Muhammad Fethullah. *Cahaya Abadi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Kebanggaan Umat Manusia*. 2nd ed. Depok: Republika Penerbit, 2011.
- Gustafsson, Johanna. "Single Case Studies vs. Multiple Case Studies: A Comparative Study." *Academy of Business, Engineering and Science Halmstad University*. Halmstad: Academy of Business, Engineering and Science Halmstad University, 2017. <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1064378%0Ahttp://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064378/FULLTEXT01.pdf>.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Edited by Ali Audah. 39th ed. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2010.
- Haryono, M. Yudhie R. *Bahasa Politik Alquran: Mencurigai Makna Tersembunyi Di Balik Teks*. Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Hasanah, May, Hadromi Alwi Lubis, Sapriadi Rambe, and Ahmad Sampurna Rambe. "Strategi Komunikasi Politik Rasulullah SAW Dalam Proses Perjanjian Hudaibiyah." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 3 (May 28, 2024): 208–17. <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/731>.
- Hendra, Tomi, Siti Amalia Nur Adzani, and Kori Lilie Muslim. "Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal." *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (June 24, 2023): 65–82. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2660>.
- Hochwarter, Wayne A, Christopher C Rosen, Samantha L Jordan, Gerald R Ferris, Aqsa Ejaz, and Liam P Maher. "Perceptions of Organizational Politics Research: Past, Present, and Future." *Journal of Management* 46, no. 6 (July 20, 2020): 879–907. <https://doi.org/10.1177/0149206319898506>.
- Hofmann, Eva, Barbara Hartl, Katharina Gangl, Martina Hartner-Tiefenthaler, and Erich Kirchler. "Authorities' Coercive and Legitimate Power: The Impact on Cognitions Underlying Cooperation." *Frontiers in Psychology* 8, no. 1 (January 18, 2017): 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00005>.
- Indah Siti Romadhonah, and Malik Ibrahim. "Komunikasi Dakwah Dalam Bingkai Teori-Teori Psikologi." *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (July 5, 2023): 77–88.

- <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.900>.
- Indrayani, Nelly, and Budi Purnomo. "Transformasi Politik Ke Jalur Dakwah: Studi Analitis Politik Masyumi Tahun 1960-1967." *Diakronika* 23, no. 1 (June 26, 2023): 44–67. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol23-iss1/311>.
- Insani, Agusti Alfi Nurul. "Dakwah Politik Nabi Muhammad Kepada Raja Heraklius, Kisra Abrawaiz, Muqauqis, Dan Najasyi." *Islamic Commucation Journal* 4 (2013): 12–26.
- Intan, Salmah. "FATHUL MAKKAH (Keteguhan Nabi Muhammad Saw. Menjalankan Perjanjian)." *Al-Hikmah* 21, no. 2 (January 15, 2020): 51–65. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/11398.
- Issah, Abeeblahi Obalowu, and Adibah Binti Abdul Rahim. "Contextual and Critical Analysis of the Ḥadith of Khalid Bin Al-Walid's Troop to Bani Jadhimah." *International Journal of Islamic Khazanah* 13, no. 1 (January 31, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.15575/ijik.v13i1.21471>.
- Ivan Sunata. "Dakwah Sirriyah Dan Jahriyah Perspektif Al-Quran." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (April 2, 2020): 24–36. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.23>.
- Jafar, Iftitah. "Tujuan Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus Dan Orientasi Dakwah Ilahi." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 34, no. 2 (2010): 285–302. <https://doi.org/10.30821/miqot.v34i2.208>.
- Jailani, Imam Amrusi. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (October 20, 2016): 269–95. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>.
- Khaeriyah, Hamzah. "Dakwah Dalam Bingkai Politik." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (April 2, 2018): 31–64. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i1.64>.
- Kraus, Sidney, and Dennis Davis. *The Effects of Mass Communication on Political Behavior*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1976.
- Mat Salleh, Mohd Kamel. "Isu Fitnah Dan Khabar Di Sebalik Peristiwa Perang Bani Al-Mustaliq." Negeri Sembilan: Universiti Teknologi MARA, 2024. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/94096>.
- Mohammad Ghozali, Wahyu Nugroho2, Siti Marpuah, Nur Kholis, and Syahrudin. "Jizyah Sebuah Jaminan Dalam Peradaban Islam Sebagai Tinjauan Historis." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 2 (January 2, 2023): 168–75. <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/9793>.
- Mubarak, Ahmad Agis. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran: (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 23, 2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nurjanah, Enur. "Madinah Charter as a Pluralistic Community Structure." *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (December 18, 2019): 210–14. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913>.
- Rachman Santoso, Bobby, Umul Baroroh, and Asep Dadang Abdullah. "SURAT SEBAGAI MEDIA DAKWAH: Studi Atas Praktek Dakwah Rasulullah Saw Terhadap Raja Heraclius, Kisra Abrawaiz, Muqouqis, Dan Najasyi." *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 1 (August 16, 2017): 118–38. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1255>.
- Ramdani, Fauziah. "Komunikasi Dakwah Rasulullah: Telaah Surat-Surat Rasulullah." *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): 1–14.
- Reka Gunawan, and Abdul Muhid. "The Strategy of Da'wah Bil Hal Communication: Literature Review." *KOMUNIKE* 14, no. 1 (June 30, 2022): 33–50. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v14i1.5270>.
- Rouf Hasbullah, Abdur. "Konstruksi Nilai-Nilai Dalam Peristiwa Fathu Makkah." *Indonesian*

- Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (July 31, 2022): 165–80. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i2.3098>.
- Saufan, Akhmad. "Strategi Dan Diplomasi Perang Rasulullah." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (June 2015): 107–34. <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.206>.
- Sholikhah, Amirotnun. "Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah Dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik)." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, no. 1 (January 23, 2017): 87–102. <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>.
- Siregar, Ali Syahbana. "Negosiasi Rasulullah Saw Dalam Mewujudkan Perjanjian Hudaibiyah." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (April 12, 2023): 118–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.458>.
- Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik." Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Surya, Alan, and Wahanani Mawasti. "Pemilihan Mad'uw Dakwah Sirri Nabi Perspektif Segmentasi Dan Targeting." *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 8, no. 1 (June 30, 2018): 99–120. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v8i1.120>.
- Suryana, Cecep. "Politik Sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (June 11, 2021): 41–58. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12646>.
- Syafe'i, Zakaria. "Sosiologi Dan Psikologi Dakwah." *ALQALAM* 19, no. 94 (September 30, 2002): 5–36. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i94.1006>.
- Tambunan, Derwin. "Politics and Power: A Critical Perspective on Legitimacy." *Journal of Social Political Sciences* 2, no. 4 (November 27, 2021): 328–41. <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i4.82>.
- Ubaidillah, Ubaidillah. "Surat Dakwah Nabi Muhammad Saw (Analisis Tematik Stas Surat-Surat Nabi Muhammad Kepada Para Raja)." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 13, no. 1 (January 1, 2015): 28–46. <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i1.487>.
- Uyuni, Badrah. "Relationship Between Politics and Dakwah in The Qur'an and As-Sunnah." *Al-Risalah* 12, no. 2 (June 11, 2021): 187–207. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1382>.
- Wildan, Mursyidul, Saepudin, and Agus Zamzam. "Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah." *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 8, no. Piagam Madinah (2022): 136. <https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2653>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2017.
- Yuliasih, Muzayyanah. "The Role of Dakwah in Community Empowerment in The Industrial Era 4.0." *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 5, no. 1 (August 2, 2022): 51–62. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v5i1.122>.
- Yusoff, Zawawi. "Mesej Dakwah Para Rasul (a.s.) Kepada Golongan Pembesar Negara." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 8 (June 2014): 86–112. <https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/119>.

